

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021

Siti Maisaroh

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Batanghari Jambi

Corresponding email: siti.maisa2000@gmail.com

Abstract: *Increasing human development in a region is influenced by government spending in both the education and health sectors. This also affects the poverty level of a region. This study aims to determine: (1) The effect of government spending on education and health simultaneously on poverty levels through the Human Development Index in Jambi Province. (2) The partial effect of government spending on education and the health sector on the poverty rate through the Human Development Index in Jambi Province. (3) The effect of government spending on Education, Health and Human Development Index simultaneously on the poverty rate in Jambi Province. (4) The partial effect of government spending on Education, Health and Human Development Index on the poverty rate in Jambi Province. The population in this study consisted of 9 districts and 2 cities in Jambi Province in 2017-2021. The type of data used is secondary data, obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). This study uses simple linear regression analysis and multiple linear regression. Test the prerequisites for data analysis using the normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. The results of the study show that: (1) Government spending on education has a significant and significant effect on the Human Development Index (IPM) in Jambi Province in 2017-2021. Meanwhile, the government spending variable in the health sector has no effect on the Human Development Index (IPM) in Jambi Province in 2017-2021. (2) Government expenditure in the education and health sectors has a simultaneous and significant effect on the Human Development Index (IPM) in Jambi Province in 2017-2021. (3) Government spending on education has no effect on the poverty rate, government spending on health has an effect on the poverty rate and the human development index has no effect on the poverty rate in Jambi Province in 2017-2021. (4) Government spending on education, the health sector and the human development index have a simultaneous and significant effect on the poverty rate in Jambi Province in 2017-2021.*

Keyword : *Government Spending, Poverty Rate, Human Development Index*

PENDUDUKAN

Pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu negara. Mencipakan pembangunan yang berkesinambungan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah negara dengan tujuan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Adi, 2007). Prioritas belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat.

Apabila Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, pada gilirannya penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya (Widodo, 2011). Pencapaian pembangunan manusia dalam suatu Negara mencakup tiga dimensi pembangunan manusia yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak dapat digambarkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Terdapat empat komponen data yang dapat menggambarkan Indeks Pembangunan Manusia yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap jumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak (Badrudin, 2012).

Penghitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, yaitu membangun indikator yang mengukur dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia dan perluasan kebebasan memilih, memanfaatkan sejumlah indikator untuk

menjaga ukuran tersebut sederhana, membentuk suatu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar. Indeks pembangunan manusia secara keseluruhan dan menjadi ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara (BPS, 2019).

Secara teknis, Indeks Pembangunan Manusia merupakan gabungan 4 indikator yaitu Angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita rill yang disesuaikan. Angka harapan hidup mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi pengetahuan pengeluaran perkapita mengukur dimensi standar hidup layak UNDP pada tahun 2010 mengubah atau menyepurnakan metode lama dengan metode yang baru. Ada beberapa alasan perubahan metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia salah satunya yaitu karena angka melek huruf sudah tidak efektif lagi digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan, karena angka melek huruf sudah tinggi di sebagian daerah.(BPS,2019).

Selain itu, tingkat kemiskinan juga mempengaruhi IPM, kemiskinan yaitu ketika seseorang atau sekelompok orang atau tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, atau kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Salah satu kemiskinan menurut *Word bank* (2004) adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak terlepas dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Landasan Teori

Pengeluaran Pemerintah

Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah adalah membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu :

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori W.W Rostow dan Musgrave

Rostow dan Musgrave (Mangkoesebroto dalam Winarti, 2014: 32) menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, antara lain; tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Teori Wagner

Teori yang menjelaskan perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap *Gross National Product* (GNP). Wagner menyatakan bahwa secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat ketika pendapatan perkapita meningkat. Penyebab utamanya karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesebroto dalam Winarti, 2014: 31).

Teori Peacock dan Wiseman

Teori yang berlandaskan pada suatu pandangan dimana masyarakat tidak menyukai untuk membayar pajak yang tinggi, akan tetapi sebaliknya pemerintah terus berusaha memperbesar pengeluarannya dengan penerimaan dari pajak yang menjadi andalannya. Peacock dan Wiseman memberikan pernyataan: masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto dalam Winarti, 2014: 31).

Kemiskinan

Secara etimologi, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS, 2019) lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makan dan non makan yang disebut garis kemiskinan. Kemiskinan biasanya dikenali dari ketidak mampuan sebuah rumah tangga atau seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai kaitan yang mencitrakan orang tersebut menjadi miskin. Kemiskinan memiliki wujud majemuk termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumberdayaproduktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan yaitu kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat pendapatan, serta diskriminasi. Kemiskinan juga dicirikan oleh tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang rendah. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah.

Ukuran Kemiskinan

Berdasarkan garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar ada 3 indikator yang digunakan yaitu :

1. Tingkat Kemiskinan (*Head Count Indek-PO*), yaitu persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Proverty Gap Indek-PI*), yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Indek-P2*), yaitu gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Penyebab Kemiskinan

Dilihat dari penyebabnya kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang terjadi karena kultur, budaya, atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang merasa cepat puas akan sesuatu yang telah dicapai, sifat bermalas-malasan dan cara berpikir masyarakat yang kurang rasional dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh alam yang kurang menguntungkan berupa tanah yang tandus, letak daerah yang terpencil, tidak adanya sumberdaya mineral dan non mineral, serta miskinnya fasilitas-fasilitas publik yang dibutuhkan.

Teori Kemiskinan

Sharp et al. (1996) dalam kuncoro (2015) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karna adanya ketidaksamaan pola pemikiran sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah yang pada gilirannya upah yang diterimanya juga rendah. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut (Ariza, 2016) Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolak ukur perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup bagi semua negara yang ada di dunia. IPM berfungsi untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara merupakan negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang serta juga sebagai pengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Kesejahteraan penduduk adalah tujuan setiap daerah yang dapat tercapai dengan pembangunan ekonomi. IPM adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi yaitu:

1. Panjang usia (*longevity*), yang diukur berdasarkan angka harapan hidup saat lahir.
2. Pengetahuan (*knowledge*), yang diukur berdasarkan angka melek huruf orang dewasa dan gabungan partisipasi sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi (dengan pembobotan yang sama pada kedua indikator).
3. Standar hidup (*standar of living*) suatu bangsa yang diukur oleh pendapatan riil per kapita. Purchasing Power Parity Indeks (PPP) (Adi:2011:2).

Ada beberapa komponen Indeks Pembangunan Manusia antara lain, yaitu (BPS, 2019):

1. Indeks Pendidikan

Perhitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.

2. Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian pertahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

3. Indeks Daya Beli (Indeks Pendapatan)

Kemampuan daya beli penduduk atau purchasing power parity (PPP) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat dalam menghitung indeks pembangunan manusia. Kemampuan daya beli ini lebih mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB perkapita atau yang dikenal dengan pendapatan perkapita.

$$IPM = 1/3 \times (IPD \times IHH \times IP)$$

Keterangan: IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

IPD (Indeks Pendidikan)

IHH (Indeks Harapan Hidup)

IP (Indeks Pendapatan Daya Beli)

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendidikan merupakan salah satu tujuan pembangunan yang mendasar, pendidikan bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan dan berharga serta fundamental kaitannya dengan gagasan lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai inti makna pembangunan yang sesungguhnya. Menurut Todaro (2011) dengan pendapatan yang lebih tinggi maka warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan, dan dengan pendidikan yang lebih baik produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan mudah tercapai. Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas telah menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan (World Bank dalam Winarti, 2014: 11).

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kesehatan adalah salah satu tujuan pembangunan yang mendasar, kesehatan sangat penting artinya bagi kesejahteraan dan fundamental dalam kaitannya dengan gagasan lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai inti makna pembangunan yang sesungguhnya. Kesehatan juga merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih bersemangat dan lebih produktif dalam menjalankan pekerjaannya. Keadaan seperti ini sering terjadi pada negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih melakukan pekerjaannya secara manual.

HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau suatu persoalan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya dan harus bersifat logis, jelas dan dapat diuji.

1. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi.
2. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi.
3. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.
4. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari 2017 hingga 2021. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, meliputi data Kemiskinan, Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017-2021, Data dari website Kementerian Keuangan RI, meliputi data pengeluaran keuangan Provinsi Jambi untuk bidang pendidikan dan kesehatan tahun 2017-2021 dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian, seperti internet, buku serta hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis (Arikunto, 2013). Dalam penelitian ini peneliti menyelidiki penelitian terdahulu, buku, jurnal, internet serta karya tulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis deskriptif dan analisa inferensial. Analisa deskriptif yaitu cara menguraikan dan menganalisa data dengan menggambarkan sejumlah peristiwa dan objek penelitian yang di tabulasikan ke dalam tabel-tabel serta mengaitkan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut.

Adapun persamaan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + e$$

$$Z_{it} = \alpha_1 + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + e$$

$$Z_{it} = \alpha + b_1Y_{it} + e$$

Keterangan

Y : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Z : Kemiskinan (jumlah penduduk)

α : Konstanta

X₁ : Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (Rupiah)

X₂ : Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (Rupiah)

b₁, b₂ : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X₁ dan X₂

i : Daerah

t : Tahun

e : Error (Variabel pengganggu)

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi. Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variabel terkait dalam mempengaruhi variabel bebasnya. Kisaran nilai koefisien determinasi R^2 adalah 0. Model dikatakan semakin baik apabila nilai R^2 mendekati 1 atau 100% .

Uji F

Untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat maka digunakan uji statistik F, dengan kriteria keputusan:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

Uji t

Uji ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependent. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). H_0 di terima jika nilai probabilitas $> (\alpha = 0,05)$, artinya variabel bebas tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dan H_a diterima jika nilai probabilitas $< (\alpha = 0,05)$, artinya variabel mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Maka dapat dilihat dari nilai probabilitas dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah kedua variabel dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak.

Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya teradi heteroskedastisitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Chow

Uji Chow adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan model yang digunakan akan menggunakan *model common effect* atau *model fixed effect*. Hipotesis yang digunakan dalam uji chow adalah:

H_0 : Comoon Effect

H_a : Fixed Effect

Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari 5%, maka ditolak. Sehingga Model menggunakan Fixed Effect. Hasil dari uji chow sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	291.209646	(10,41)	0.0000
Cross-section Chi-square	235.237061	10	0.0000

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai probabilitas ChiSquare sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga menyebabkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka model yang digunakan Fixed Effect.

Uji Hausman

Uji hausman adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan. Uji hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Random Effect

H_a : Fixed Effect

Apabila hasil probabilitas Chi-Square lebih dari 5%, maka sebaiknya model menggunakan *Random Effect* dan sebaliknya apabila kurang dari 5% maka menggunakan *Fixed Effect*. Hasil dari uji hausman sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.838875	3	0.0050

Hasil probabilitas Chi-Square sebesar 0.0050. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa model sebaiknya menggunakan *Fixed Effect*.

**Tabel 3. Analisis Regresi Data Panel
Hasil Analisis Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.70316	30.91817	1.575228	0.1229
X1	-0.005303	0.009267	-0.572219	0.5703
X2	0.018779	0.008073	2.326052	0.0250
Z	-0.404356	0.458548	-0.881819	0.3830

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

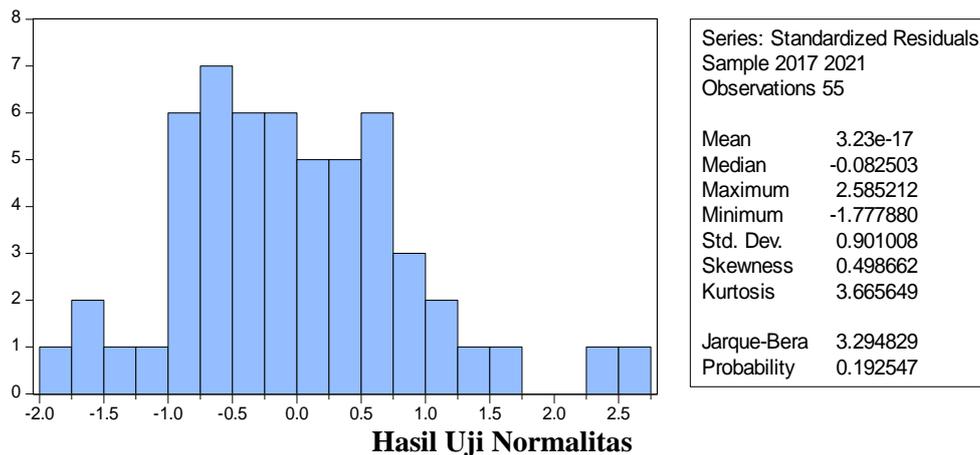
$$Y_{it} = \alpha + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + Z_{it} + e$$

$$Y_{it} = 48.70316 - 0.005303 + 0.018779 - 0.404356$$

1. Dari persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien konstanta sebesar 48.70316. Artinya jika seluruh variabel independen memiliki nilai sama dengan satu (1) maka tingginya tingkat kemiskinan sebesar 48.7031%.
2. Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan memiliki nilai sebesar 0.005303 dengan tanda negatif. Artinya setiap penambahan per satu-satuan variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 0.005%.
3. Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan memiliki nilai sebesar 0.018779 dengan tanda positif. Artinya setiap penambahan per satu-satuan variabel pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan, maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0.018779%.
4. Koefisien regresi variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai sebesar 0.404356 dengan tanda negatif. Artinya setiap penambahan per satu-satuan variable Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar sebesar 0.40%.

Uji Asumsi klasik

Uji Normalitas



Berdasarkan uji normalitas diatas, probabilitas sebesar 0.192547 menunjukkan bahwa probabilitas >0.05 . Sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-22.53191	14.25202	-1.580963	0.1216
X1	-0.007152	0.004272	-1.674100	0.1017
X2	0.008489	0.003722	2.281118	0.0778
Z	0.309749	0.211372	1.465421	0.1504

Berdasarkan hasil uji pada tabel 5.13 diatas, diperoleh nilai probabilitas masing-masing variabel independen $>0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	Z
X1	1.000000	0.855985	0.845248
X2	0.855985	1.000000	0.894548
Z	0.845248	0.894548	1.000000

Berdasarkan hasil output di atas diperoleh nilai kolerasi antar independen kurang dari 0,80 maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolienaritas.

Uji Autokolerasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.584722	Mean dependent var	25.71327
Adjusted R-squared	0.560294	S.D. dependent var	11.86605
S.E. of regression	7.868417	Akaike info criterion	7.033538
Sum squared resid	3157.511	Schwarz criterion	7.179526
Log likelihood	-189.4223	Hannan-Quinn criter.	7.089993
F-statistic	23.93641	Durbin-Watson stat	0.588888
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari hasil output uji DW yang telah dilakukan, didapatkan hasil Durbin-Watson stat sebesar 0.588888. sedangkan nilai dU di dapat melalui tabel dW dengan jumlah sampel 55 (N) dan jumlah variabel bebas (K) 2 maka di dapat nila dU sebesar 1.6406 berarti $dU < 4-dw$ ($1.6406 < 3.411112$) maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Tabel 7. Uji F

R-squared	0.994234	Mean dependent var	25.71327
Adjusted R-squared	0.992406	S.D. dependent var	11.86605
S.E. of regression	1.034031	Akaike info criterion	3.120137
Sum squared resid	43.83804	Schwarz criterion	3.631094
Log likelihood	-71.80376	Hannan-Quinn criter.	3.317728
F-statistic	543.8560	Durbin-Watson stat	1.775689
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil uji F terlihat bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($543.8560 > 3.18$) dengan tingkat Prob (F-Statistic) sebesar 0.000000. Dengan menggunakan tingkat α 0.05 atau 5% maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan variabel pengeluaran Spemerintah pada bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Tabel 8. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.70316	30.91817	1.575228	0.1229
X1	-0.005303	0.009267	-0.572219	0.5703
X2	0.018779	0.008073	2.326052	0.0250
Z	-0.404356	0.458548	-0.881819	0.3830

Berdasarkan data di atas pengujian variabel pengeluaran pemerintah pada bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021 menghasilkan:

1. Variabel X1 pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan hasil nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0.572219 < 0.67915$) dengan tingkat signifikansi (p-value) = 0.5703 (> 0.05). Karena nilai p-value $> \alpha$ (5%) maka dengan demikian H_{a1} ditolak, yang berarti bahwa variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.
2. Variabel X2 pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan hasil nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2.326052 < 0.67915$) dengan tingkat signifikansi (p-value) = 0.0250 (< 0.05). Karena nilai p-value $< \alpha$ (5%) maka dengan demikian H_{01} ditolak, yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang Kesehatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.
3. Variabel Z Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan hasil nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0.881819 < 0.67915$) dengan tingkat signifikansi (p-value) = 0.3830 (> 0.05). Karena nilai p-value $> \alpha$ (5%) maka dengan demikian H_{a1} ditolak, yang berarti bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.

Koefisien Determinasi R^2

Tabel 9. Koefisien Determinasi

R-squared	0.994234	Mean dependent var	25.71327
Adjusted R-squared	0.992406	S.D. dependent var	11.86605
S.E. of regression	1.034031	Akaike info criterion	3.120137
Sum squared resid	43.83804	Schwarz criterion	3.631094
Log likelihood	-71.80376	Hannan-Quinn criter.	3.317728
F-statistic	543.8560	Durbin-Watson stat	1.775689
Prob(F-statistic)	0.000000		

Koefisien determinasi atau *goodness of fit* diperoleh angka sebesar 0.992406. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 99,24%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi tahun 2017-2021. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi tahun 2017-2021
2. Variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan berpengaruh dan signifikan secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.
3. Variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, variabel pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.
4. Variabel pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh dan signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2017-2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, Ngakan Made Agung dan Dewi, Ni Putu Martini. 2018. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Tingakt Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.7, No 2 Februari 2018.
- Adi Widodo, dkk 2011 "*Analisi Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*". FEB Universitas Diponegoro Semarang.
- Atdjar, R. 2018. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawrman* vol 3 (4)
- BPS, 2017-2021, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Dalam Angka*. Provinsi Jambi.
- BPS. 2007. *Data dan Indeks Pembangunan Manusia*. BPS Kota Jambi.
- Bps.go.id Jambi
- Hidayati, D. R. 2022. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan akuntansi* 24 (4)
- [Jhingan. 2003. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.](#)
- Julio, D. S. A. 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Investasi Swasta terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Bakorwil V Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*. Epositry Universitas Jember.
- Lanjouw Petter, dkk. "*Poverty Education and Helth in Indonesia : Who Benefits From Public Spending* ". World Bank Discussion Paper No 339, Washington.2001.

Siti Maisaroh, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Jambi Tahun 2017-2021*

Lestari, D. D. 2020. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. *Skripsi*. Universitas Islam Riau

Putra, Adi Dwi, 2015. "*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung*". FEB Universitas Lampung.

Sukirno, Sadono, 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta. PT Raja Drafindo Persada.

Todaro, Michael. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ke-7 (Terjemahan Bahasa Indonesia). Jakarta. PT Erlangga

Wahid, Bila. A. 2012. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi*. Makassar.